Jurnal Jendela Inovasi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
E-ISSN: 2621-8739
http://jurnal.magelangkota.go.id
Volume IX No. 2, Magelang, Agustus 2026, Hal. 79-89

PENGELOLAAN DAN KUALITAS RUANG TERBUKA PUBLIK TEPIAN SUNGAI KARANG MUMUS: STUDI KOMPARATIF LIMA KASUS

Muhammad Adhitya Rizqita Pratama[1)], Jimly Al Faraby[2)]
Universitas Gadjah Mada
e-mail: muhammadadhityarizqitapratama@mail.ugm.ac.id

Article Info:
• Article submitted: 4 July 2025 • Article received: 24 November 2026 • Available online: 24 November 2026

ABSTRAK

Ruang terbuka publik (RTP) memiliki peran penting dalam mendukung kualitas lingkungan perkotaan dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan membandingkan kualitas lima ruang terbuka publik di kawasan tepian Sungai Karang Mumus, Kota Samarinda, berdasarkan karakteristik pengelolaannya, yaitu pemerintah dan LSM/Ormas. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Evaluasi kualitas RTP dilakukan berdasarkan enam variabel utama, meliputi aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, estetika, fasilitas, dan inklusivitas. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan keunggulan berdasarkan tipe pengelola. RTP yang dikelola LSM/Ormas memiliki rata-rata skor aksesibilitas lebih tinggi (3,48) dibandingkan RTP pemerintah (3,26), yang didukung oleh integrasi ruang dengan permukiman warga. Sebaliknya, RTP yang dikelola pemerintah mencatatkan skor inklusivitas sedikit lebih tinggi (3,33) dibandingkan LSM/Ormas (3,25). Meskipun demikian, RTP pemerintah masih menghadapi tantangan signifikan dalam pemeliharaan fasilitas fisik sehari-hari. Penelitian ini juga menemukan anomali berupa tingginya persepsi positif pengguna meskipun kondisi fisik ruang mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya keterikatan pengguna terhadap ruang. Berdasarkan temuan tersebut, diusulkan model pengelolaan kolaboratif yang menekankan pembagian tanggung jawab secara jelas, pendanaan berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat yang terstruktur guna meningkatkan kualitas serta keberlanjutan RTP.

Kata Kunci: ***Pengelolaan Ruang Terbuka Publik, Kualitas Ruang Terbuka Publik, Sungai Karang Mumus.***

ABSTRACT

Public open spaces (POS) play an important role in supporting urban environmental quality and community social life. This study aims to compare the quality of five public open spaces along the banks of the Karang Mumus River in Samarinda City based on their management characteristics, namely government-managed and NGO/community organization-managed spaces. The study employs a descriptive qualitative method with a comparative case study approach. The evaluation of POS quality is based on six main variables: accessibility, safety, comfort, aesthetics, facilities, and inclusivity. The findings reveal differences in strengths according to management type. NGO/community organization-managed POS have a higher average accessibility score (3.48) than government-managed POS (3.26), supported by the integration of public spaces with surrounding residential areas. Conversely, government-managed POS record a slightly higher inclusivity score (3.33) than those managed by NGOs/community organizations (3.25). Nevertheless, government-managed POS face significant challenges in the day-to-day maintenance of physical facilities. This study also identifies an anomaly in which users maintain positive perceptions despite the deteriorating physical conditions of the spaces, indicating a form of place attachment. Based on these findings, a collaborative management model is proposed, emphasizing clear divisions of responsibility, sustainable funding, and structured community involvement to improve the quality and sustainability of public open spaces.

Keywords: Public Open Space Management, Public Space Quality, Karang Mumus River.

Copyright © 2026 by Authors, Published by Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang.
This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Kota Samarinda, sebagai pusat perkotaan yang berkembang pesat di Kalimantan Timur, telah mengalami transformasi signifikan, terutama di sepanjang Sungai Karang Mumus. Sungai ini, yang merupakan anak Sungai Mahakam sepanjang 34,7 kilometer, secara historis berfungsi sebagai arteri vital bagi kehidupan kota, termasuk jalur transportasi, sumber mata pencarian, dan pusat aktivitas sosial budaya, bahkan dianggap sebagai "wajah kota". Namun, laju urbanisasi yang pesat telah menyebabkan degradasi signifikan pada Sungai Karang Mumus, ditandai dengan kualitas air yang buruk, bau menyengat, dan tumpukan sampah (Rahayu, 2020). Permukiman padat penduduk, dengan sekitar 200 rumah ilegal di sempadan sungai, memperparah kondisi lingkungan dan ketersediaan ruang publik, menciptakan paradoks di mana pertumbuhan kota justru mengikis identitas aslinya sebagai "kota tepi sungai".

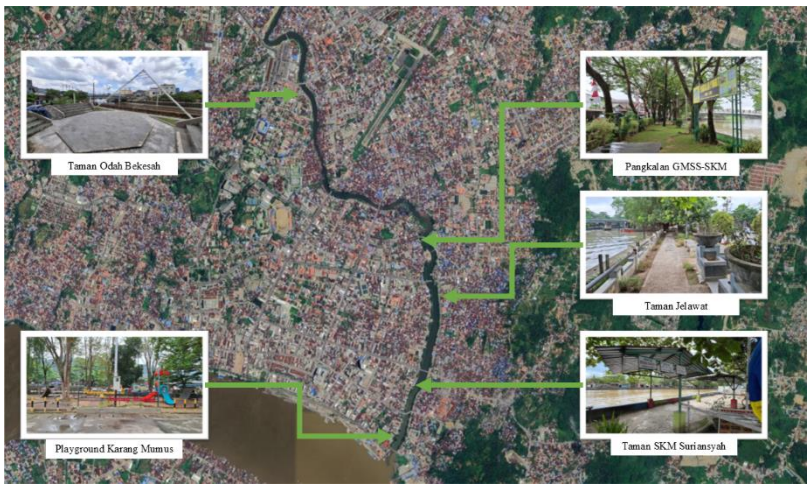
Di tengah degradasi ini, keberadaan ruang publik menjadi krusial. Ruang publik didefinisikan sebagai tempat umum di mana masyarakat melakukan aktivitas rutin dan fungsional yang mengikat komunitas, memfasilitasi pertemuan, interaksi, dan sosialisasi (Carr, 1992; Puspitasari & Santosa, 2018). Kualitas fisik dan aktivitas ruang publik berkontribusi kuat dalam proses penciptaan tempat yang bermakna bagi warga kota (Project for Public Spaces, 2018). Pentingnya ruang publik dalam meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan—baik dari segi lingkungan, masyarakat, maupun kota—telah ditekankan oleh berbagai ahli yang berpendapat bahwa aktivitas sosial sangat bergantung pada kualitas ruang publik. Namun, identitas Samarinda sebagai "kota tepi sungai" mulai memudar akibat pembangunan yang tidak terencana, menimbulkan kesan kumuh, menghalangi pandangan dan akses langsung ke sungai, serta menciptakan ketidakseimbangan sosial-ekonomi.

Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ruang publik di kawasan tepi sungai Karang Mumus memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Tanpa pengelolaan yang baik, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali menyebabkan pencemaran sungai dan risiko bencana. Hal ini menunjukkan masalah perilaku dan budaya yang mendalam, menekankan perlunya

intervensi fisik serta pendidikan masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif.

Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya menata kawasan ini melalui kebijakan Garis Sempadan Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah 2014-2034, dengan tujuan mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis waterfront (Tumbelaka & Wibowo, 2019) dan jalur evakuasi. Program relokasi warga juga telah diintensifkan, namun implementasinya menghadapi tantangan besar. Untuk memahami kualitas ruang publik ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan enam variabel yang dioperasionalisasikan dari teori desain urban (Carmona et al., 2003; 2008): Aksesibilitas, Keamanan, Kenyamanan, Estetika, Fasilitas, dan Inklusivitas. Lebih lanjut, konsep Star Model of Publicness (Varna, 2010; Nafi'ah, 2021) digunakan untuk menilai seberapa "publik" sebuah ruang berdasarkan aspek kepemilikan, kontrol, keadaban, pemaknaan fisik, dan animasi kegiatan.

Penelitian sebelumnya seringkali berfokus pada evaluasi tunggal tanpa membandingkan aktor pengelolanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan merumuskan pertanyaan: "Bagaimana perbandingan kualitas ruang terbuka publik pada kawasan tepian sungai Karang Mumus di Kota Samarinda antara yang dikelola oleh pemerintah dengan LSM/Ormas?".



Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber: Analisis Pribadi

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh analisis kuantitatif deskriptif, serta mengidentifikasi masalah fisik dan non-fisik pada ruang terbuka publik (RTP) di kawasan tepian Sungai Karang Mumus, Kota Samarinda. Evaluasi dilakukan secara komparatif pada lima lokasi studi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pengelola dan pengunjung, serta penyebaran kuesioner kepada pengguna ruang publik.

Survei kuesioner dilaksanakan dengan melibatkan 100 responden yang didistribusikan secara merata (20 responden per lokasi). Kuesioner diberikan kepada pengunjung yang sedang berada di ruang terbuka publik. Instrumen kuesioner menggunakan Skala Likert 4 poin (1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik). Skor rata-rata dihitung menggunakan rumus distribusi frekuensi melalui perangkat lunak SPSS, dengan batas kategori penilaian kualitas sebagai berikut: 1,00 - 1,75 (Buruk); 1,76 - 2,50 (Kurang); 2,51 - 3,25 (Baik); dan 3,26 - 4,00 (Sangat Baik).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kualitas Ruang Terbuka Publik (RTP) di kawasan tepian Sungai Karang Mumus dilakukan dalam dua tahap: pertama, evaluasi kondisi aktual RTP secara keseluruhan menggunakan kuesioner dan SPSS; kedua, analisis distribusi penilaian berdasarkan variabel aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, estetika, fasilitas, dan inklusivitas. Kedua tahap ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, dengan fokus pada lima lokasi studi kasus.

Tabel 1. Analisis Model Pengelolaan RTP di Tepi Sungai Karang Mumus

Ruang Terbuka Publik	Pembangunan	Sumber Dana	Perawatan
Taman SKM Suriansyah	Komunitas (Ormas Kepemudaan Karang Mumus) dan Pemerintah (Kota Samarinda)	Komunitas (Ormas Kepemudaan Karang	Komunitas (Ormas Kepemudaan Karang Mumus)

		Mumus) dan Pemerintah (Kota Samarinda)	dan Pemerintah (DLH Samarinda)
Pangkalan GMSS SKM	Komunitas (LSM Sekolah Sungai)	Komunitas (LSM Sekolah Sungai)	Komunitas (LSM Sekolah Sungai) dan Pemerintah (DLH Samarinda)
Taman Odah Bekesah	Pemerintah (Kementrian PU)	Pemerintah (APBN)	Pemerintah (DLH Samarinda)
Taman Playground SKM	Pemerintah (Dinas Perkim Samarinda)	Pemerintah (APBD)	Pemerintah (DLH Samarinda)
Taman Jelawat	Pemerintah (Dinas Perkim Samarinda)	Pemerintah (APBD)	Pemerintah (DLH Samarinda)

Sumber: Analisis Pribadi

Seluruh ruang terbuka publik di tepian Sungai Karang Mumus berstatus milik Pemerintah Kota Samarinda, namun pengelolaannya mencerminkan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan komunitas. Meskipun sebagian besar pembangunan dan pendanaannya ditanggung oleh negara melalui APBN/APBD, terdapat pula beberapa ruang publik yang murni diinisiasi dan didanai secara swadaya oleh masyarakat. Dalam hal perawatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda secara rutin bertugas membersihkan area ini setiap pagi, tetapi ruang publik yang dikelola dengan melibatkan partisipasi aktif warga sekitar terbukti memiliki tingkat kebersihan dan keberlanjutan yang jauh lebih optimal.

C.1. Taman SKM Suriansyah (Dikelola LSM/Ormas)

Taman SKM Suriansyah, yang dulunya permukiman di tepi Sungai Karang Mumus, dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau pada tahun 1999, awalnya dibangun dengan dana swadaya RT dan kemudian menerima dukungan Pemkot Samarinda, meskipun kebersihan tetap di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Taman ini bersih dan sejuk dengan pepohonan, namun masih kekurangan fasilitas seperti tempat duduk, penerangan, dan tempat sampah, sehingga kurang ideal bagi pengunjung luar area. Meskipun demikian, taman ini dimanfaatkan untuk kegiatan sosial RT dan disewakan sebagai tempat makan di malam hari. Hasil analisis menunjukkan kualitasnya "baik" secara keseluruhan, dengan aksesibilitas dan

inklusivitas sangat baik, namun fasilitas menjadi kontribusi terendah. Isu utama yang teridentifikasi adalah kebersihan yang belum optimal, minimnya tempat sampah, dan ketiadaan tempat duduk yang memadai, berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.

C.2. Pangkalan Pungut GMSS-SKM (Dikelola LSM/Ormas)

Pangkalan Pungut GMSS-SKM, sebuah ruang terbuka publik di tepi Sungai Karang Mumus, dulunya dikelola RT sebelum diubah oleh LSM pada 2017 menjadi pusat gerakan sosial lingkungan untuk membersihkan sungai, didanai sepenuhnya oleh LSM dengan partisipasi aktif masyarakat. Observasi menunjukkan kondisi fisik pangkalan sangat bersih, terawat, sejuk, dan dilengkapi fasilitas memadai seperti tempat sampah terpilah dan area duduk. Hasil analisis SPSS menunjukkan kualitasnya "sangat baik" secara keseluruhan, dengan nilai tertinggi pada aksesibilitas dan kenyamanan. Namun, permasalahan krusial yang teridentifikasi adalah ketiadaan fasilitas parkir khusus yang mengganggu lalu lintas dan estetika, serta minimnya penerangan malam hari yang mengurangi keamanan dan pemanfaatan ruang.

C.3. Taman Odah Bekesah (Dikelola Pemerintah)

Taman Odah Bekesah, yang dibangun pada tahun 2021 oleh Kementerian PUPR melalui program KOTAKU dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, berfungsi sebagai tempat rekreasi dan relaksasi. Meskipun analisis SPSS menunjukkan kualitasnya "sangat baik" secara keseluruhan dengan inklusivitas tertinggi, observasi lapangan mengungkapkan kondisi fisik yang memprihatinkan, seperti toilet yang tidak layak pakai, taman bunga yang mengering, dan kebersihan yang buruk. Taman ini masih dimanfaatkan warga sekitar untuk bersantai dan kegiatan posyandu, namun wawancara mengidentifikasi tantangan seperti lokasi terpencil, fasilitas rusak, minimnya penerangan malam, dan ketiadaan CCTV yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.

C.4. Taman Playground Karang Mumus (Dikelola Pemerintah)

Taman Playground Karang Mumus, yang dibangun pada tahun 2023 sebagai bagian dari program "Satu Kelurahan Satu Ruang Terbuka Publik" oleh Pemerintah Kota Samarinda dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, dirancang sebagai area bermain anak dan interaksi sosial. Observasi menunjukkan kondisi fisik taman sangat baik, dengan wahana bermain yang aman, suasana sejuk, dan tertata rapi, menjadikannya ramai dikunjungi terutama sore hari. Meskipun dilengkapi pagar pengaman, warga mengeluhkan kurangnya tempat duduk dan minimnya penerangan malam. Analisis SPSS menunjukkan kualitasnya "baik" secara keseluruhan, dengan inklusivitas dan aksesibilitas tinggi, namun fasilitas dinilai paling rendah. Isu utama yang teridentifikasi adalah ketersediaan bangku yang tidak memadai dan lokasi taman yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah sementara, menimbulkan gangguan estetika dan potensi masalah kesehatan.

C.5. Taman Jelawat (Dikelola Pemerintah)

Taman Jelawat, sebuah ruang terbuka hijau di Jalan Jelawat, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, dulunya merupakan permukiman tepi sungai yang dialihfungsikan pada tahun 2014 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, dengan pengelolaan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Taman ini sangat ramai dikunjungi karena lokasi strategis, suasana sejuk, dan keberadaan pedagang kaki lima. Namun, kebersihannya sangat memprihatinkan akibat tidak adanya tempat sampah, menyebabkan sampah berserakan, dan kurangnya fasilitas parkir yang memadai menimbulkan kemacetan. Meskipun analisis SPSS menunjukkan kualitasnya "baik" secara keseluruhan dengan inklusivitas tertinggi, masalah kebersihan, minimnya fasilitas dasar (tempat sampah, toilet), kurangnya penerangan malam, dan masalah parkir menjadi keluhan utama pengguna.

Berdasarkan analisis data kuesioner pengguna, terdapat perbedaan signifikan antara ruang terbuka publik (RTP) yang dibangun oleh LSM/Ormas dengan yang dibangun oleh pemerintah.

Tabel 2. Tabel Penilaian RTP LSM/Ormas

	Aksebilitas	Keamanan	Kenyamanan	Estetika	Fasilitas	Inklusifitas
Taman SKM Suriansyah	3,58	3	2,44	2,42	2,36	3,28
Pangkalan GMSS SKM	3.38	3	3.40	3.11	3.11	3.21
Rata-rata	3.48	3	2.92	2.76	2.74	3.25

Sumber: Analisis Pribadi

Tabel 3. Tabel Penilaian RTP Pemerintah

	Aksebilitas	Keamanan	Kenyamanan	Estetika	Fasilitas	Inklusifitas
Taman Odah Bekesah	3.23	2.87	2.98	3.03	2.85	3.35
Taman Playground SKM	3.37	3.14	3.07	2.90	2.18	3.43
Taman Jelawat	3.18	2.95	2.47	2.61	2.36	3.21
Rata - rata	3.26	2.98	2.84	2.84	2.46	3.33

Sumber: Analisis Pribadi

Berdasarkan analisis, Ruang Terbuka Publik (RTP) yang dikelola oleh komunitas (LSM/Ormas) unggul dalam variabel Aksesibilitas (3,48) dibandingkan Pemerintah (3,26). Hal ini disebabkan letak RTP komunitas yang secara organik menyatu dengan halaman permukiman warga, memecah batas kaku antara ruang publik dan privat. Pengelolaan ruang berbasis komunitas terbukti efektif menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif (Yuliastuti & Wahyono, 2014) dan menciptakan sinergi kolaboratif dalam merawat ruang (Kurniawan, 2017). Sebaliknya, RTP Pemerintah mencatatkan keunggulan tipis pada variabel Inklusivitas (3,33 vs 3,25), membuktikan bahwa ruang rancangan pemerintah dengan manajemen formal terpusat (Sihombing et al., 2021) lebih mampu menarik pengunjung dari berbagai latar belakang di luar warga lokal, sebagaimana teori Varna (2010) tentang akses fisik makro yang lebih demokratis.

Terdapat anomali menarik pada Taman Odah Bekesah. Hasil observasi lapangan menunjukkan kondisi fisik yang memprihatinkan (toilet tidak layak pakai, taman mengering), namun responden memberikan skor yang cukup baik pada kuesioner. Berdasarkan analisis wawancara, tingginya skor persepsi ini merupakan bentuk keterikatan tempat (place attachment) (Altman & Low, 1992) dan rasa syukur warga atas adanya ruang terbuka di tengah padatnya permukiman. Keterikatan emosional ini mampu mengabaikan penurunan kondisi fisik karena ruang publik tersebut memfasilitasi kebutuhan interaksi masyarakat (Ahmed & Haykal, 2022), meskipun secara standar objektif fasilitas tersebut rusak. Ini menegaskan perbedaan antara persepsi subjektif pengguna dengan kelayakan teknis.

Dalam konteks tepian sungai, seluruh lokasi menghadapi keterbatasan pada indikator interaksi dengan air. Fasilitas yang terbangun cenderung memunggungi sungai, tidak menyediakan akses aman langsung ke perairan, dan isu aroma tidak sedap saat kemarau masih menjadi faktor penurun kenyamanan. Meskipun Taman Jelawat dan Playground SKM memiliki pagar pembatas (aspek keselamatan), interaksi ekologis masyarakat dengan Sungai Karang Mumus masih sangat minim.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan studi komparatif pada lima ruang terbuka publik di tepian Sungai Karang Mumus, disimpulkan bahwa RTP yang dikelola berbasis komunitas (LSM/Ormas) memiliki rata-rata kualitas yang lebih baik pada aspek aksesibilitas dan kenyamanan berkat rasa kepemilikan komunal. Sebaliknya, RTP yang dibangun pemerintah unggul dalam menjamin inklusivitas ruang bagi seluruh elemen masyarakat kota, meski secara konsisten menghadapi masalah serius dalam pemeliharaan fasilitas jangka panjang akibat birokrasi dan minimnya dana operasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni penilaian didasarkan pada lima kasus spesifik yang mungkin tidak merepresentasikan seluruh RTP di Samarinda, serta indikator tepi sungai yang masih bersifat umum.

Sebagai saran, diusulkan Model Pengelolaan Kolaboratif. Model ini menuntut pembagian peran yang jelas: Pemerintah Kota bertindak sebagai penyedia dana

revitalisasi fisik besar dan pengawas standar desain; sementara LSM, Ormas, atau paguyuban RT/RW tingkat lokal diberikan kewenangan hukum (SK Pengelola) dan bantuan dana swakelola untuk pemeliharaan harian (kebersihan, penjagaan malam, animasi kegiatan). Sistem ini perlu dipantau secara berkala melalui monitoring yang melibatkan akademisi dan perwakilan pengguna ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, F., & Haykal, M. (2022). Sense of Place dan Keterikatan Tempat di Ruang Publik Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 15(1), 89-102.

Altman, I., & Low, S. M. (1992). *Place Attachment*. New York: Plenum Press.

Atika, F. A. & Poedjioetami, E. (2022). Creative Placemaking pada Ruang Terbuka Publik Wisata Bangunan Cagar Budaya, untuk Memperkuat Karakter dan Identitas Tempat. *PAWON: Jurnal Arsitektur*, 6(1), 133-148. https://doi.org/10.36040/pawon.v6i1.3810

Breen A. dan Rigby, D. (1994). *Waterfront: Cities Reclaim Their Edge*. New York: McGraw-Hill Profesional Publishing.

Carmona, et al. (2003). *Public Places - Urban Spaces: The Dimension of Urban Design.* London: Architectural Press.

Carmona, et al. (2008). *Public Space: The Management Dimension*. New York: Routledge, Taylor & Francis group.

Carr, et al. (1992). *Public Space.* Australia: Press Syndicate of University of Cambridge.

Fitriandini, Sumaiyah. (2014). Efektivitas Pemanfaatan Taman Kota Lembah Gurame di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Desain & Konstruksi*, 13(2).

Gehl, J. (1987). *Life between Buildings: Using Public Space*. Washington DC: Island Press.

Khaerunnisa. (2014). Perancangan Kawasan Tepi Air Teluk Palu yang berbasis sustainable urban landscape. *Thesis*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Kurniawan, B. (2017). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kolaboratif: Sinergi Pemerintah dan Komunitas. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 14(1), 55-70.

Marhendra, C.P., Wulandari, L.D., & Pamungkas, S.T. (2014) Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Alun-alun Batu. *Jurnal Mahasiswa Departemen Arsitektur*, 2(2), 1-13.

Montgomery, J. (1998). Making a City: Urbanity, Vitality and Urban Design. *Journal of Urban Design*, 3(1), 93-116. https://doi.org/10.1080/13574809808724418

Morfosa, Merry. (2002). Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Pusat Kota Yogyakarta. *Thesis.* Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Nafi'ah, R. (2021). Evaluasi Karakter Publik pada Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Pendekatan Star Model. *Planoearth*, 17(2), 145-158.

Nugroho, Yoga Adi. (2022). Pengukuran Tingkat Kualitas Elemen Placemaking pada Ruang Terbuka Publik Kawasan Tepi Air. *Journal of Infrastructure & Science Engineering*, 5(2), 73-86.

Prijadi, R., Sangkertadi, & Tarore, R.D.Ch. (2014). Pengaruh Permukaan Jalur Pedestrian Terhadap Kepuasan dan Kenyamanan Pejalan Kaki. *Jurnal Media Matrasain*, 11(1), 43-54.

Project for Public Spaces. (2018). *Placemaking: What if We Built Our Cities Around Places?* New York: PPS.

Puspitasari, A. D., & Santosa, H. R. (2018). Kualitas Ruang Publik dalam Mengakomodasi Interaksi Sosial Masyarakat Perkotaan. *TATALOKA*, 20(3), 200-212.

Rahayu, S. (2020). Analisis Degradasi dan Strategi Penataan Sempadan Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. *Jurnal Tata Ruang*, 8(3), 112-125.

Sihombing, A., et al. (2021). Manajemen Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Ruang Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 45-60.

Tumbelaka, G., & Wibowo, A. (2019). Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Publik Berbasis Waterfront City. *Jurnal Arsitektur*, 11(2), 34-45.

Varna, G. & Tiesdell, S. (2010). Assessing the Publicness of Public Space: The Star Model of Publicness. *Journal of Urban Design*, 15(4), 575-598. https://doi.org/10.1080/13574809.2010.502350

Yuliastuti, N., & Wahyono, H. (2014). Model Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Berbasis Komunitas. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(1), 22-35.